

**BAB III**  
**GAMBARAN UMUM HARIAN KOMPAS DAN DATA**  
**PEMBERITAAN**

**3.1. Gambaran Umum Harian Kompas**

**3.1.1. Sejarah Harian Kompas**

Harian Kompas lahir tanggal 28 Juni 1965, tiga bulan sebelum peristiwa politik G 30 S PKI meletus. Lahirnya Kompas tersebut diprakarsai oleh tokoh-tokoh Katholik dengan motto ‘Amanat Hati Nurani Rakyat.’ Hati nurani adalah wujud semangat hidup tidak pantang menyerah terhadap segala macam tekanan hidup, keesokan harinya barulah Kompas mulai dipasarkan (Kasman, 2010: 154-155).

Surat kabar Kompas dalam sejarah pers Indonesia menduduki tempat yang unik, karena Kompas hidup dalam tiga periode yang berlainan, yaitu masa Orde Lama, Orde Baru, dan era reformasi. Nama Kompas sering diplesetkan dengan banyak istilah seperti, ‘Komando Pastur,’ ‘Komando Pas Seda,’ ‘Komando Pasukan,’ dan ‘Komt Pas Morgen.’ Hal ini tentu ada dasarnya yakni ketika Kompas lahir, tiap-tiap surat kabar mempunyai afiliasi politik mengharuskan Kompas memiliki afiliasi politik juga.

Harian Kompas pun berafiliasi dengan Partai Katholik, yang diketuai oleh Frans Seda. Para Jenderal, seperti A.H. Nasution dan Ahmad Yani mendukung

gagasan tersebut, mereka mengangkat Petrus Kanisius Ojong yang memilih Jacob Oetomo sebagai rekanya (Kasman, 2010: 146-147). Kehadiran surat kabar Kompas tidak lepas kaitanya dengan kelompok militer dan aktivis Katholik saat itu.

Awal tahun 1965, Letjen Ahmad Yani selaku Menteri/Panglima TNI-AD menelepon rekanya yang sekabinet, Drs. Frans Seda. Yani melemparkan ide menerbitkan koran untuk membangkitkan semangat republik bagi rakyat juga tentara untuk melawan pers komunis. Frans Seda menanggapi ide tersebut dan membicarakannya dengan Ignatus Josef Kasimo sesama rekan di Partai Katholik dan dengan rekannya yang memimpin majalah Intisari, Petrus Kanisius Ojong dan Jakob Oetomo.

PK Ojong dan Jakob Oetomo kemudian menggarap ide tersebut dan mempersiapkan penerbitan Koran. Semula nama yang dipilih “Bentara Rakyat,” penggunaan nama itu dimaksudkan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa pembela rakyat yang sebenarnya bukanlah PKI. Dalam keperluan dinas Frans Seda sebagai Menteri Perkebunan menghadap Presiden di Istana Merdeka, Soekarno telah mendengar bahwa Seda akan menerbitkan sebuah koran lalu menyarankan nama Kompas “Pemberi arah dan jalan dalam mengarungi lautan atau hutan rimba.”

Maka jadilah nama harian Kompas hingga saat ini, sementara nama Yayasan Bentara Rakyat adalah penerbit harian Kompas. Para pendiri Yayasan Bentara Rakyat adalah para pemimpin organisasi Katholik seperti: Partai Katholik, Wanita Katholik, PMKRI, dan PK. Ojong.

Pengurus yayasan terdiri dari Ketua: I.J. Kasimo, Wakil Ketua: Drs. Frans Seda, Penulis I: F.C. Palaunsuka, Penulis II: Jakob Oetama, dan Bendahara: PK. Ojong (Kasman, 2010: 152-153). Walaupun restu dari Presiden Soekarno, berkat dari Mgr. Soegijapranoto, dan bantuan pimpinan Angkatan Darat, proses izin terbit mengalami kesulitan. PKI dan kaki tangannya menguasai aparat, khususnya Departemen Penerangan Pusat dan Daerah.

PKI tidak mentolerir sebuah harian yang akan menjadi saingan berat. Tahap demi tahap rintangan dapat diatasi, pusat memberi izin prinsip namun harus dikonfirmasi ke Daerah Militer V Jaya. Persyaratan terakhir untuk dapat terbit, harus ada bukti 3000 (tiga ribu) orang pelanggan. Frans Seda punya inisiatif mengumpulkan tanda tangan anggota partai, guru sekolah, anggota-anggota koperasi Kopra Primer di Kabupaten Ende Lio, Kabupaten Sikka, dan Kabupaten Flores Timur. Dalam waktu singkat daftar 3.000 pelanggan lengkap dengan alamat dan tanda tangan terkumpul. Bagian perizinan Puskodam V Jaya menyerah dan mengeluarkan izin terbit. Pers PKI yang

melihat kehadiran Kompas bereaksi keras, bahkan mulai menghasut masyarakat dengan menggantikan Kompas sebagai “Komando Pastor.”

PKI sejatinya sudah mencium maksud di balik pendirian Kompas. “PKI tahu rencana kami, lantas dihadang, namun karena Bung Karno setuju kita jalan terus hingga izinnnya keluar,” ujar Seda. Jalan sudah lancar, dan akhirnya dengan karyawan dan wartawan yang direkrut dari Intisari, Yayasan Bentara Rakyat menerbitkan Kompas edisi percobaan pada 28 Juni 1965. Setelah tiga edisi percobaan, Kompas reguler pun terbit (Miskiyya, 2011: 77-78).

Kompas sempat dua kali dilarang terbit. *Pertama*, pada 2 Oktober 1965 ketika Penguasa Pelaksana Perang Daerah Jakarta Raya mengeluarkan larangan terbit untuk semua surat kabar, termasuk Kompas, sebagai upaya agar pemberitaan tidak menambah rasa bingung masyarakat terkait peristiwa Gerakan 30 September yang tengah berkecamuk. Kompas terbit kembali pada 6 Oktober 1965. Pada 21 Januari 1978, Kompas untuk kedua kalinya dilarang terbit bersama enam surat kabar lainnya. Pelarangan terkait pemberitaan seputar aksi mahasiswa menentang kepemimpinan Presiden Soeharto menjelang pelaksanaan Sidang Umum MPR 1978. Pelarangan bersifat

sementara dan pada 5 Februari 1978, Kompas terbit kembali.

Pada edisi perdana, Kompas terbit empat halaman dengan 11 berita pada halaman pertama. Terdapat enam buah Iklan yang mengisi kurang dari separuh halaman. Pada masa-masa awal berdirinya, Kompas terbit sebagai surat kabar mingguan dengan delapan halaman, lalu terbit empat kali seminggu, dan dalam waktu dua tahun berkembang menjadi surat kabar harian nasional dengan tiras 30.650 eksemplar.

Sejak 1969, Kompas merajai penjualan surat kabar secara nasional. Pada 2004, tiras harian mencapai 530.000 eksemplar, sedangkan edisi Minggu mencapai 610.000 eksemplar. Kompas diperkirakan dibaca 2,25 juta orang di seluruh Indonesia. Dengan tiras sebesar itu, Kompas menjadi surat kabar terbesar di Indonesia.

Untuk memastikan akuntabilitas jumlah tiras, sejak 1976, Kompas menggunakan jasa ABC (*Audit Bureau of Circulations*) untuk melakukan audit. Saat ini, Kompas Cetak (bukan versi digital) memiliki tiras rata-rata 500.000 eksemplar per hari, dengan rata-rata jumlah pembaca mencapai 1.850.000 orang per hari yang terdistribusi ke seluruh wilayah Indonesia (<http://print.kompas.com/about/sejarahkompas.html>).

Dalam perjalanannya, harian Kompas beberapa kali menerima penghargaan dalam berbagai bidang. Dalam bidang fotografi pada tahun 1974 foto Pangeran Bernhard (Belanda) menggendong orang utan dalam kunjungannya ke Jakarta tahun 1973 karya Kartono Riyadi memenangi penghargaan World Press Photo 1974.

Pada tahun 1983 Kompas menjadi Juara Umum Penghargaan Jurnalistik Adinegoro PWI Jaya 1982/1983 dengan 3 trofi, 1 medali perak, 1 medali perunggu. Salah satu karya yang mendapatkan trofi adalah karikatur GM Sudarta. Pada bulan Februari 2008 PWI memberikan “Lifetime Achievement Award” kepada lima tokoh pers, termasuk Jakob Oetama yang selama hidupnya telah membaktikan diri bagi pers Indonesia (Miskiyya, 2011: 85).

Pada tahun 2012, Harian Kompas mendapat penghargaan dari Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI). Selama dua tahun ini, Kompas dinilai sebagai satu-satunya media yang konsisten dan komprehensif menyosialisasikan kondisi geologi Indonesia, melalui peliputan *Ring of Fire* (cincin api), dan penghargaan Adam Malik (Award), untuk kategori media dan jurnalis terbaik. Pada tahun 2013, Harian Kompas meraih penghargaan *Asian Media Award* 2013. Fotografer Kompas, Agus Susanto meraih penghargaan perunggu untuk fotonya 'Indonesia Lawan

Korea Utara (SCTV Cup)' ([http://id.wikipedia.org/wiki/Kompas\\_\(surat\\_kabar\)#Penghargaan\\_dan\\_Rekor](http://id.wikipedia.org/wiki/Kompas_(surat_kabar)#Penghargaan_dan_Rekor)).

### **3.1.2. Visi dan Misi**

Motto “Amanat Hati Nurani Rakyat” di bawah logo Kompas, menggambarkan visi dan misi bagi disuarakannya hati nurani rakyat. Berangkat dari visi dan misi ini Oetama yang dikutip Dewabrata mengatakan bahwa “Berita harus bermutu, harus mengangkat persoalan yang ada dalam masyarakat, harus memanusiakan manusia, membela hak asasi manusia.” Sedangkan Swantoro selaku Wakil Pimred Kompas menafsirkan pesan Oetama bahwa, “Mutu di sini bukan hanya isinya, tetapi juga cara menyajikannya.”

Menurut Santoso, Kompas ingin berkembang sebagai institusi pers yang mengedepankan keterbukaan, meninggalkan pengkotakan latar belakang suku, ras, agama dan golongan. Karena Kompas merupakan lembaga yang terbuka, Kompas ingin menempatkan kemanusiaan sebagai nilai tertinggi, mengarahkan focus perhatian dan tujuan pada nilai-nilai yang transenden atau mengatasi kepentingan kelompok.

Visi Kompas adalah menjadi institusi yang memberikan pencerahan bagi perkembangan masyarakat Indonesia yang demokratis dan bermartabat, serta menjunjung tinggi asas dan nilai kemanusiaan.

Dalam kiprahnya di industri pers “Visi Kompas” berpartisipasi membangun masyarakat Indonesia beru berdasarkan Panca Sila melalui prinsip humanism transcendental (persatuan dan perbedaan) dengan menghormati individu dan masyarakat adil dan makmur, seperti uraian sebagai berikut:

*Pertama*, Kompas adalah lembaga pers yang bersifat umum dan terbuka. *Kedua*, Kompas tidak melibatkan diri dalam kelompok-kelompok tertentu baik politik, agama, sosial, atau golongan, ekonomi. *Ketiga*, Kompas secara aktif membuka dialog dan berinteraksi positif dengan segala kelompok. *Keempat*, Kompas adalah koran nasional yang berusaha mewujudkan aspirasi dan cita-cita bangsa. *Kelima*, Kompas bersifat luas dan bebas dalam pandangan yang dikembangkan tetapi selalu memperhatikan konteks struktur kemasyarakatan dan pemerintahan yang menjadi lingkungan (Kasman, 2010: 160).

Misi Kompas adalah mengantisipasi dan merespon dinamika masyarakat secara professional, sekaligus memberi arah perubahan (*Trend Setter*) dengan menyediakan dan menyebarluaskan informasi terpercaya.

Kompas berperan serta ikut mencerdaskan bangsa, menjadi nomor satu dalam semua usaha diantara usaha-usaha lain yang sejenis dalam kelas yang sama. Hal tersebut dicapai melalui etika usaha bersih dengan melakukan kerja



sama dengan perusahaan-perusahaan lain. *Pertama*, Kompas memnerikan informasi yang berkualitas dengan ciri: cepat, cermat, utuh, dan selalu mengandung makna. *Kedua*, Kompas memiliki bobot jurnalistik yang tinggi dan terus dikembangkan untuk mewujudkan aspirasi dan selera terhormat yang dicerminkan dalam gaya kompak, komunikatif dan kaya nuansa kehidupan dan kemanusiaan.

*Ketiga*, kualitas informasi dan bobot jurnalistik dicapai melalui upaya intelektual yang penuh empati dengan pendekatan rasional, memhami jalan pikiran dan argumentasi pihak lain, selalu berusaha mendudukan persoalan dengna penuh pertimbangan tetapi kritis dan teguh pada prinsip. *Keempat*, berusaha menyebarkan informasi seluas-luasnya dengan meningkatkan tiras. Untuk dapat perealisasikan visi dan misi Kompas harus memperoleh keuntungan dan usaha. Namun keuntungan yang dicari bukan sekedar demi keuntungan itu sendiri tetapi menunjang kehidupan layak bagi karyawan dan pengembangan usaha sehingga mampu melaksanakan tanggung jawab sosialnya sebagai perusahaan (Kasman, 2010: 161).

### **3.1.3. Struktur Organisasi Harian Kompas**

PT. Kompas Media Nusantara adalah lembaga media massa, pemimpin tertinggi adalah Pemimpin Umum,

Pemimpin Umum dibantu oleh Wakil Pemimpin Umum Bidang Non Bisnis dan Wakil Pemimpin Umum Bidang Bisnis, kemudian ada Pemimpin Redaksi yang bertanggung jawab di bidang redaksi, dan pemimpin Perusahaan yang bertanggung jawab di bidang bisnis. Dibawah Pemimpin Redaksi ada Redaktur Pelaksana dan dibawahnya terdapat Kepala Desk, Kepala Biro dan paling bawah adalah Reporter. Di bidang bisnis, di bawah Pemimpin Perusahaan ada General Manajer Iklan dan dan General Manajer Sirkulasi, serta General Manajer *marketing communication*.

Di antara dua bidang itu, ada bagian penelitian dan pengembangan, Direktorat SDM-Umum, dan Teknologi informasi. Mereka sifatnya *supporting* dan di bawah supervise Wakil Pemimpin Umum non bisnis, sementara untuk Pemimpin Perusahaan disupervisi Wakil Pemimpin Umum bidang bisnis. Pembagian dalam struktur organisasi ini, dimaksudkan untuk memudahkan pembagian sistem kerja. Produk Kompas yang dihasilkan itu merupakan hasil kerja sinergis dari unit-unit yang ada dalam struktur organisasi (Kasman, 2010: 161).

### **3.1.4. Struktur Redaksi Harian Kompas**

#### **Pemimpin Umum**

Jakob Oetama

#### **Wakil Pemimpin Umum**

Agung Adiprasetyo, St. Sularto

**Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab**

Rikard Bagun

**Wakil Pemimpin Redaksi**

Trias Kuncahyono, Budiman Tanuredjo, Ninuk Mardiana  
Pambudy

**Redaktur Pelaksana**

James Luhulima

**Wakil Redaktur Pelaksana**

Mohammad Bakir, Bambang sigap Sumantri, Rusdi Amral

**Sekretaris Redaksi**

Retno Bintarti, M. Nasir (Kompas, 26/11/2013: 6)

**Staf Redaksi**

Taufik Mihardja, S J. Osdar, Cris Pudjiastuti, Pieter P. Gero, M. Suprihadi, Myrna Ratna M, Johnny T. Gunardi, Sri Hartati Samhadi, Banu Astono, Try Harijono, P Tri Agung Kristanto, Yunas Santhani Aziz, Sutta Dharmasaputra, Johannes Waskita Utama, Bre Redana, Maria Hartiningsih, Hariadi Saptono, Simon Saragih, Mohamad Subhan, Yesayas Oktavianus, Agnes Aristiarini, Agus Hermawan, Fandri Yuniarti, Frans Sartono, Elly Roosita, Atika Walujani, Anton Sanjoyo, R. Adhi Kusumaputra, Suhartono, Agus Mulyadi, Tjahja Gunawan Diredja, Kenedi Nurhan, Putu Fajar Arcana, Subur Tjahjono, Yovita Arika, Nasrullah Nara, A. Maryoto, Johannes Eudes Wawa, Nasru Alam Aziz, Imam

Prihadiyoko, Adi Prinantyo, Danu Kusworo, Dahono Fitrianto, Gesit Ariyanto, Marcellus Hernowo, Yulia Saphthiani, Wisnu Nugroho, Gunawan Setiadi, Diah Marsidi, A.F Eko Warjono, Budiarto Shambazy, Hendry Ch Bangun, Mulyawan Karim, Yuni Ikawati, Rene L. Pattiradjawane, Briggita Isworo Laksmi, AW Subarkah, Soelastri, Ratih p Sudarsono, Pepih Nugraha, Arbain Rambey, Salomo Simanungkalit, C Windoro A T, Rakaryan Sukarjaputra, Eddy Hasby, Alif Ichwan, Clara Wresti, Karano Nicolash LMS, Pascal S. Bin Sadju, Ferry Santoso, Elok Dyah Messwati, Joice Tauris Santi, Ida Setyorini, Buyung Wijaya Kusuma, Pingkan Elita Dundu, Edna Caroline Pattisina, Osa Triyatna, Agus Susanto, Lusiana Indriasari, Nawa Tunggal, Susana Rita, Iwan Santoso, Susi Ivvaty, Luki Aulia, iwan Setiyawan, Dewi Indriastuti, Maria Susy Berindra A, Nur Hidayati, Wisnu Dewabrata, Antonius Tomy Trinugroho, Amir Sodikin, Evy Rachmawati, B. Josie Susilo Hardianto, Indira Permanasari S., Gatot Widakdo, Budi Suwarna, Lasti Kurnia, M. Yuniadhi Agung, Hamzirwan, Prasetyoa Eko P, Samsul Hadi, Hermas Effendi Prabowo, Ester Lince Napitupulu, m. Fajar marta, Sarie Febriane, Dwi As Setyaningsih, Affan Adenensi Riza Fathoni, Cyprianus Anto Saptowalyono, Anita Yossihara, Andy Riza Hidayat, Khaerudin, Emillus Caesar Alexey, Ahmad Arif, Nell Triana, Brigita Maria

Lukita, Haryo Damardono, Ilham Khoiri, M. Zaid Wahtudi, Helena Fransisca Nababan, Raditya Helabumi Jayakarna, Fransisca Romana Ninik, Ambrosius Harto, Demitrius Wisnu Widianoro, Aryo Wisanggeni Genthong, C. Wahyu Haryo P, R. Benny Dwi Koestanto, Madina Nusrat, Mahdi Muhammad, Lucky Pransiska, Priyambodo, Heru Sri Kumoro, Totol Wijayanto, Ingki Rinaldi, Agnes Rita Sulistyawati, Agung Stiyahadi, Wisnu Aji Dewabrata, Ichwan Susanto, Aswin Rizal Harahap, Agustinus Handoko, Mukhamad Kurniawan, Fx. Laksana Agung Saputra, Nina Susilo, Didit Putra Erlangga Rahardjo, Wawan hadi Prabowo, Hendra Agus Setyawan, Anthony Lee, Mawar Kusuma Wulan Kuncoro Mnajik, **Cairo:** Mustafa Abdurrahman, **Bandung:** Dedi Muhtadi, Samuel Oktor, Rny Ariyanto Nugroho, **Tasikmalaya:** Cornelius Helmy Herlambang, **Semarang:** Sonya Hellen Sinombor, Winarto Herusansono, **Tegal:** Siwi Nurbijanti, **Kudus:** Albertus Hendriyo Widi Ismanto, **Solo:** Sri Rejeki, Erwin Edhi Prasetya, **Yogyakarta:** Thomas Pudjo Widijanto, **Magelang:** Regina Rukmorini, **Surabaya:** Agnes Swetta Pandia, Dody Wisnu Pribadi, **Lamongan:** Adi Sucipto, **Malang:** Dahlia Irawati, Defri Werdiono, **Madiun:** Runik Sri Astuti, **Jember:** Syamsul Hadi, **Banyuwangi:** Siwi Yunita Cahyaningrum, **Denpasar:** Cokordo Yudistira, Ayu Sulistyowati, **Mataram:** Kaerul Anwar, **Kupang:** Frans

Sarong, Kornelis Kewa Ama, **Manado:** Jean Rizal Layuck, **Palu:** Reny Sri Ayu, **Ambon:** Antonius Ponco Anggoro, **Medan:** Aufrida Wismi Warastri, M. Hilmi Faiq, **Banda Aceh:** Mohamad Burhanudin, **Pekanbaru:** Syahnan Rangkuti, **Batam:** Kris Razianto, **Jambi:** Irma Tambunan, **Bengkulu:** Adhitya Ramadhan, **Bandarlampung:** Yulvianus Harjono, **Palangkaraya:** Dwi Bayu Radius, **Balikpapan:** Lukas Adi Prasetya.

**GM Litbang:** F. Harianto Santoso, **Manajer Diklat:** Sri Fitriasia Martisasi.

**Kantor Redaksi:** Jl. Palmerah Selatan 26-28, Jakarta 10270 **Telepon:** 534 7710/20/30, 530 2200 Fax 548 6085/548 3581 **Alamat Surat (Seluruh Bagian):** PO BOX 4612 Jakarta 12046 **Alamat Kawat:** Kompas Jakarta **Penerbit:** PT Kompas Media Nusantara **Surat Izin Usaha Penerbitan Pers:** SK Menpen No. 013/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1985 tanggal 19 November 1985, serta keputusan Laksus pangkopkamtibda No. 103/PC/1969 tanggal 21 Januari 1969 **Anggota Serikat Penerbit Surat Kabar:** No 37/1965/11/A/2002 Percetakan PT. Gramedia ISSN 0215-207X ISI DI LUAR TANGGUNG JAWAB PERCETAKAN (Kompas, 17/1/2014: 15)

## **3.2. Data Pemberitaan Undang-Undang Ormas**

### **3.2.1. Berita pada hari Rabu, 3 Juli 2013**

Berita pertama berjudul “Parlemen Persilahkan Uji Materi UU Ormas” menggambarkan hasil putusan dari sidang paripurna yang dipimpin wakil ketua DPR Taufik Kurniawan. Dari 361 anggota DPR yang hadir sebanyak 311 setuju RUU Ormas disahkan menjadi UU. Sedangkan 50 anggota lainnya meminta agar ditunda pengesahannya. Sudut pandang berita mengenai aspirasi rakyat yang perlu dipertimbangkan sesuai dengan UUD 1945, seperti yang dikatakan Direktur Eksekutif Elsam Indri D Saptaningrum yang mengingatkan bahwa UUD 1945 menjamin kebebasan warga negara untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat.

Sejumlah ormas seperti PP Muhammadiyah, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Perkumpulan Keluarga Brencana Indonesia (PKBI), The Wahid Institute dan Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) langsung berencana mengajukan uji materi UU Ormas ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pemerintah melalui panitia khusus malik haramain mempersilahkan pihak-pihak yang tidak puas dengan keputusan tersebut, dan berjanji akan menerima apapun hasilnya.

Menurut dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Jakarta, Daniel Yusmic, mengatakan langkah

masyarakat membawa RUU Ormas ke MK adalah langkah yang tepat. Karena keberadaan MK sebagai salah satu fungsi kontrol kekuasaan legislatif telah mempunyai fungsi yang baik. Pada akhir berita Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kemendagri Tanribali Lamo menyatakan telah menyiapkan tiga peraturan pemerintah untuk melaksanakan UU tersebut, yaitu terkait pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, dan pengaturan ormas yang didirikan warga negara asing.

### **3.2.2. Berita pada hari Kamis, 4 Juli 2013**

Berita kedua dengan judul “RUU Ormas Kontrol Dana Asing ke Ormas.” Dengan mengambil sudut pandang mengenai pengelolaan dana ormas yang bersumber dari dana asing harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Untuk mendukung *angle* tersebut, Kompas mengambil pasal 37 ayat (1) dari RUU Ormas yang menyatakan keuangan ormas dapat bersumber dari berbagai pihak. Salah satunya adalah bantuan asing. Dan ayat (2) mengatur, keuangan ormas harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Menteri Dalam Negeri Gumawan Fauzi, mengatakan kalau dana tidak jelas bisa saja dana itu dipakai untuk kepentingan teroris, pencucian uang, dan misi-misi lain yang merugikan bangsa.

Namun, menurut Koordinator Koalisi Kebebasan Berserikat Fransisca Fitri, sikap negara dianggap berlebihan



soal pengaturan dana asing tersebut. Manurutnya, dialihkannya fokus perhatian dari pengantisipasi kekerasan oleh ormas menjadi pengaturan dana asing memperburuk kecurigaan masyarakat terhadap maksud tersembunyi negara. Pada akhir berita Kompas menuliskan penggalangan gerakan untuk melawan RUU Ormas termasuk mengajukan uji materi ke MK.

### **3.2.3 Berita pada hari Jumat, 5 Juli 2013**

Berita ketiga dengan judul “Sipil Siap Membangkang” mengambil sudut pandang kelompok masyarakat diminta fokus pada uji materi. Hal ini ditengarai oleh para tokoh masyarakat sipil yang dijadwalkan berkumpul untuk mendeklarasikan pembangkangan sipil untuk melawan UU Ormas seperti yang dikatakan Direktur Lembaga bantuan Hukum (LBH) Jakarta Febi Yonesta. Pendapat senada juga disampaikan Direktur Program Imparsial Al Araf, yang menyatakan perlawanan ormas tidak hanya perlawanan hukum, melainkan juga perlawanan secara politik.

Namun, Direktur Eksekutif Institute for Strategic and Development Studies M Aminuddin meminta kelompok-kelompok masyarakat yang menolak UU Ormas fokus menyiapkan gugatan uji materi kepada MK. Menurutnya, langkah legal itu merupakan hak konstitusional warga dan dinilai lebih produktif daripada menggerakkan unjuk rasa

massa di jalanan. Pada berita kali ini, Kompas mengambil narasumber baik yang utama atau pendukung dari kelompok masyarakat. Pernyataan dari pemerintah atau anggota DPR tidak ada yang dicantumkan, Kompas juga menampilkan secara detail persoalan RUU Ormas dalam bentuk tabel yang meliputi definisi ormas, sumber dana, pasal larangan, lingkup wilayah, ormas yang didirikan warga negara asing, dan ormas yang berhubungan dengan organisasi politik.

### **3.2.4 Berita pada hari Sabtu, 6 Juli 2013**

Berita berikutnya dengan judul “Hindari Pembangkangan” dengan sudut pandang pemerintah siapkan tiga peraturan untuk UU Ormas. Pada awal berita Sekretaris PP Muhammadiyah Abdul mu’ti, dan Manajer Advokasi Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (Concern ABN) Ali Nurdin secara terpisah menghimbau agar kelompok masyarakat tidak terjebak menggerakkan pembangkangan sipil terkait UU Ormas yang disahkan DPR. Selain dinilai tidak legal, langkah itu dinilai tidak efektif untuk menolak perundang-undangan baru tersebut.

Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar, mengatakan, dia belum mengetahui apa yang harus diboikot terkait UU Ormas, karena harus dipikirkan secara matang keefektivitasnya. Meski menuai penolakan dari berbagai ormas, pemerintah

tetap menyiapkan peraturan untuk menjalankan UU Ormas tersebut. Yakni meliputi, pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, dan pengaturan ormas yang didirikan warga negara asing.

### **3.2.5 Berita pada hari Senin, 8 Juli 2013**

Berita selanjutnya berjudul “Saling Curiga di UU Ormas.” Kali ini Kompas mengambil sudut pandang dua ormas berbasis Islam Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang mendukung transparansi dana. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan PP Muhammadiyah yang keberatan dengan sejumlah pasal dalam UU Ormas mendukung gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Namun, keduanya mendukung pasal tentang transparansi dana bagi ormas dan memantau serta mengawasi penerapan UU, terutama yang dianggap bermasalah.

Soal transparansi pendanaan, NU juga mendukung. Selama ini kegiatan organisasi telah diaudit secara rutin, meski tidak dilaporkan secara terbuka kepada publik, tetapi laporan pendanaan itu diberikan kepada siapa pun yang memintanya. Senada dengan NU, Muhammadiyah juga tidak keberatan, karena ada atau tidak ada UU itu, Muhammadiyah telah berusaha melakukan transparansi pendanaan. Hanya saja memang belum dilakukan laporan kepada publik karena dianggap tidak relevan.

Abdul Mu'ti menjelaskan, pendanaan Muhammadiyah bersumber dari sumbangan anggota dan masyarakat yang sifatnya tidak mengikat yakni, zakat, infaq, sedekah, dan dari sumbangan amal usaha Muhammadiyah, seperti rumah sakit, sekolah, dan perguruan tinggi. Ada juga kemitraan-kemitraan atau kerja sama dengan pendanaan asing untuk melaksanakan program-program lembaga.

**Tabel 1.4**

**Berita Surat Kabar Harian Kompas Tentang Pro Kontra Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan Edisi Juli 2013**

No	Judul	Jml Hlm	Edisi
1	Parlemen Persilahkan Uji Materi UU Ormas	2	3 Juli 2013
2	RUU Ormas Kontrol Dana Asing Ke Ormas	1	4 Juli 2013
3	Sipil Siap Membangkang	1	5 Juli 2013
4	Hindari Pembangkangan	1	6 Juli 2013
5	Saling Curiga di UU Ormas	2	8 Juli 2013